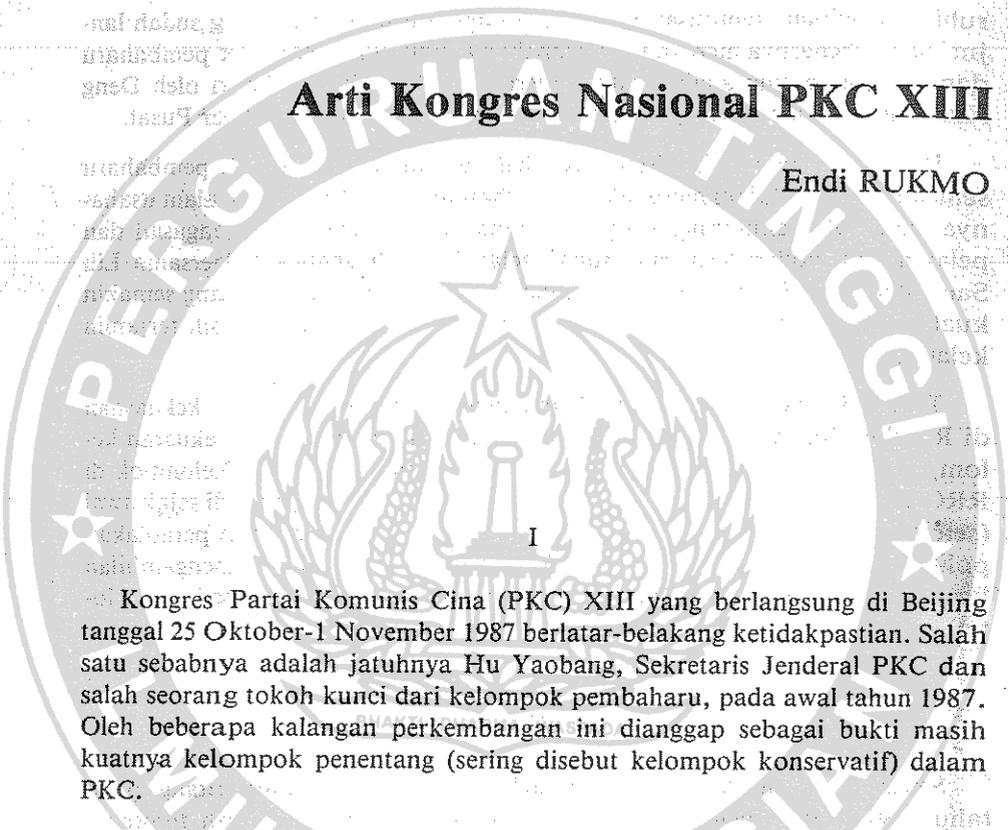


250

Arti Kongres Nasional PKC XIII

Endi RUKMO



Kongres Partai Komunis Cina (PKC) XIII yang berlangsung di Beijing tanggal 25 Oktober-1 November 1987 berlatar-belakang ketidakpastian. Salah satu sebabnya adalah jatuhnya Hu Yaobang, Sekretaris Jenderal PKC dan salah seorang tokoh kunci dari kelompok pembaharu, pada awal tahun 1987. Oleh beberapa kalangan perkembangan ini dianggap sebagai bukti masih kuatnya kelompok penentang (sering disebut kelompok konservatif) dalam PKC.

Tetapi setelah Kongres mengangkat Zhao Ziyang, juga seorang tokoh kunci dalam kelompok pembaharu, sebagai Sekretaris Jenderal PKC yang baru dan Li Peng, anak angkat mendiang Zhou Enlai, terpilih sebagai Perdana Menteri menggantikan Zhao Ziyang, semakin jelas ke mana perkembangan di Cina untuk masa mendatang (sedikitnya sampai akhir abad ini) akan diarahkan. Ini makin terlihat lagi setelah hasil lengkap anggota Politbiro dan Komite Tetap Politbiro, sebagai organ partai tertinggi, diumumkan. Sedikitnya sebelas dari 20 anggota Politbiro (termasuk anggota pengganti) dan empat dari lima anggota Komite Tetap Politbiro berasal dari kelompok pembaharu hasil didikan Zhou Enlai dan Deng Xiaoping. Anggota lain adalah tokoh-tokoh teknokrat atau netral,¹ sedangkan tokoh-tokoh kelompok konservatif tinggal beberapa saja yaitu Jenderal Wei Guoqing, bekas Komisaris Politik Tentara Pembebasan Rakyat (TPR), Jenderal Li Desheng dan Jenderal Chen Xilian. Tetapi tampaknya ketiga tokoh TPR tersebut tidak akan mempenga-

¹Komite Tetap Politbiro dari kelompok pembaharu adalah: (1) Zhao Ziyang; (2) Li Peng; (3) Yao Yilin; (4) Hu Qili. Sementara itu tokoh-tokoh pembaharu lainnya yang menjadi anggota

ruhi pengambilan keputusan karena di samping usia mereka yang sudah lanjut, juga sebenarnya mereka itu merupakan pendukung kelompok pembaharu dan yang terpenting adalah bahwa mereka ini bisa dikendalikan oleh Deng Xiaoping yang masih tetap menjabat sebagai Ketua Komisi Militer Pusat.

Dari hasil Kongres XIII itu tampak bahwa kekuatan kelompok pembaharu semakin kokoh. Hal ini merupakan keberhasilan Deng Xiaoping dalam usahanya merekrut orang-orang yang lebih muda guna meneruskan gagasan dan pelaksanaan modernisasi yang sudah sejak lama dicanangkan bersama Liu Saoqi dan Zhou Enlai. Dengan dominasi kelompok pembaharu yang semakin kuat di organ tertinggi partai itu program modernisasi dapat lebih terjamin kelancarannya.

Tulisan ini akan mengulas perkembangan perubahan struktur kekuasaan di Republik Rakyat Cina (RRC) dan khususnya perkembangan kekuatan kelompok pembaharu. Pergolakan kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok di RRC itu bisa lebih jelas bila dilihat dari perkembangan yang terjadi sejak awal (setelah negeri itu dikuasai oleh PKC tahun 1949). Perkembangan pergolakan politik itu sangat mempengaruhi tindak-tanduknya baik dalam pengambilan keputusan dalam negeri maupun pandangannya mengenai politik internasional.

Setelah bersatu dalam menggulingkan Pemerintah Kuomintang pada tahun 1949, para pemimpin PKC tampak mulai terpecah-pecah terutama dalam dua kelompok. Suasana tenang hanya berlangsung tujuh tahun pertama saja. Sejak dilangsungkannya Kongres Nasional PKC VIII dalam bulan September 1956, perpecahan itu semakin jelas. Kedudukan tokoh utama di RRC pada waktu itu, Mao Zedong, dalam kongres itu mulai goncang. Kongres memutuskan untuk menghapus semua yang berkenaan dengan Mao Zedong dan pemikirannya.²

Keputusan kongres tersebut berlatar-belakang pada kegagalan Mao Zedong dalam usaha penerapan sistem pembangunan ekonomi yang sesuai dengan ideologi yang dianut. Memang sejak kemenangan PKC tahun 1949 itu, RRC berupaya merombak struktur lembaga-lembaga pemerintahan sebelumnya dan menggantikannya dengan yang baru. Segera para pemimpin Cina menyatakan untuk sepenuhnya mengikuti model pembangunan Soviet (Stalinis) dalam mengkonstruksi perekonomiannya, misalnya dengan menekankan pelaksanaan sistem pembangunan berencana, penekanan pada pengawasan sentral, kolektivisasi dan pembangunan industri berat. Kebijakan ini dilaksa-

nakan dalam Repelita I (1953-1957). Tetapi sistem yang diterapkan secara tergesa-gesa itu gagal antara lain karena tidak terdapatnya tenaga kader yang mampu.³

Sementara itu renggangnya hubungan RRC-Soviet terutama sejak Kongres Partai Komunis Soviet XX bulan Februari 1956, di mana Khrushchev melontarkan kebijakan de-Stalinisasi, sangat mempengaruhi program pembangunan di RRC. De-Stalinisasi itu sendiri sebenarnya tidak ditujukan ke Cina. Meskipun demikian Mao Zedong yang pada dasarnya Stalinis sangat terpukul, terlebih lagi setelah kelompok yang pro de-Stalinisasi (Liu Saoqi, Zhou Enlai dan Deng Xiaoping) mendesak Mao agar mengikuti perkembangan yang sedang terjadi di Uni Soviet itu.

Mao Zedong segera mencari dukungan dan berusaha memperkuat kedudukannya dengan memanfaatkan organ propaganda partai untuk menarik kaum intelektual yang pada waktu itu mulai melancarkan kritik-kritik terhadap usaha sosialisasi PKC dan merangkul kembali kelompok dalam partai yang menentangnya. Salah satu usaha yang terkenal adalah melancarkan kampanye "biarkan seratus bunga berkembang." Tetapi karena kegagalannya dalam mengatasi krisis-krisis yang terjadi pada waktu itu, terutama yang berkaitan dengan sistem kolektif, Mao Zedong gagal memperoleh dukungan, bahkan pada tahun 1959 ia dicopot dari kedudukannya sebagai Ketua PKC dan digantikan oleh Liu Shaoqi. Masa sejak Kongres VIII itu merupakan masa kemenangan pertama kelompok Pembaharu, terutama bagi Deng Xiaoping yang pada kongres itu diangkat sebagai Sekjen Komite Pusat PKC.

Tetapi karena pengaruh kharisma yang besar sebagai pemimpin masa perjuangan melawan Kuomintang, Mao Zedong berhasil bertahan dan bahkan ia berhasil mendapatkan banyak dukungan dalam melontarkan kritikan terhadap kelompok Liu. Pada suatu pertemuan Komite Sentral PKC bulan September 1962 ia berhasil mewujudkan prakarsa tentang "kampanye pendidikan sosialis." Dengan dalih membersihkan unsur-unsur revisionis, Mao melancarkan kampanye pembersihan terhadap para penentangnya. Kedudukannya semakin kuat setelah pertemuan Komite Tetap Politbiro (September-Oktober 1965) menerima rancangannya mengenai kampanye anti-pemikiran borjuis yang reaksioner dalam partai.

Gagasannya itu ternyata mendapat dukungan dari kaum muda yang kemudian diorganisir menjadi *Pengawal Merah* yang merupakan kekuatan inti Gerakan Revolusi Kebudayaan (GRK) yang berlangsung tahun 1966-1967. Lebih dari itu, Mao berhasil pula memperkuat kedudukannya terutama dengan munculnya kelompok Revolusi Kebudayaan cabang Shanghai yang diketuai oleh isterinya sendiri, Ny. Jiang Qing dan ketiga rekannya, Yao

Wanyuan, Wang Hungwen dan Zhang Chungqiao. Mereka ini kemudian dikenal dengan sebutan "Empat Sekawan," dan berhasil dimasukkan oleh Mao ke dalam organ tertinggi partai, yaitu Politbiro.

Ketika kelompok Mao itu melancarkan serangannya terhadap kelompok pembaharu yang dicap sebagai revisionis, situasi politik di Cina menjadi kacau, sehingga sekolah-sekolah ditutup pada bulan Juni 1966. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pengawal Merah untuk menyerang apa saja yang dianggap menyimpang dari pemikiran Mao. Pada saat itulah sebagian besar anggota kelompok pembaharu ditangkapi oleh Pengawal Merah yang semakin banyak pendukungnya tidak saja karena sekolah-sekolah ditutup, tetapi juga karena suasana konflik antara Cina dan Uni Soviet semakin memanas, sehingga orang-orang yang mendukung kelompok pembaharu semakin dibenci karena dianggap pro-Soviet. Begitu gencarnya serangan Pengawal Merah ini sehingga kecuali Zhou Enlai, semua tokoh pembaharu berhasil dibersihkan.

GRK ini memuncak pada bulan Januari 1967, ketika Komite Pusat gerakan itu memerintahkan Pengawal Merah untuk mengambil-alih kekuasaan partai. Mereka lalu bergerak ke seluruh negeri dan menduduki kantor-kantor PKC serta mengusir para pejabat partai setempat. Akibatnya organisasi PKC berantakan. Pada waktu itulah nama Mao Zedong mulai dikultuskan. Dalam situasi tanpa saingan Mao berhasil menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin tertinggi yang dipuja-puja. Bahkan semua pemikirannya diterbitkan dan harus dibaca dan dipelajari oleh seluruh rakyat.

Tetapi GRK dalam tindakannya semakin brutal dan tak terkendalikan. Segala yang berbau pikiran lama dihancurkan, para penentang Mao ditangkapi dan disiksa. Melihat perkembangan ini akhirnya Mao Zedong memerintahkan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) turun tangan, dan melaksanakan pembentukan Komite Revolusi di propinsi-propinsi. GRK sendiri diputuskan untuk dibubarkan pada bulan Juli 1968 dengan alasan mereka gagal mengemban misi. Karena TPR diserahi tugas ini, maka wajar kalau keanggotaan Komite Revolusi itu didominasi oleh orang-orang militer.⁴

Dominasi militer dalam komite ini membuka peluang bagi Lin Biao untuk mencalonkan diri sebagai pengganti Mao. Namanya naik pesat setelah ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan berhasil membawa TPR ke era modern dengan suksesnya percobaan nuklir pertama tahun 1964 meskipun tanpa bantuan Soviet. Percobaan ini diteruskan dan sampai bulan Mei 1966 Cina telah berhasil melakukan tiga kali percobaan. Hal ini mempengaruhi meningkatnya kebanggaan nasional rakyat Cina terutama dalam usahanya menandingi Uni Soviet. Ketenaran Lin Biao memuncak setelah Revolusi Kebudayaan dinyatakan berhenti. Bahkan ia dianggap sebagai pemimpin kedua Cina setelah Ketua

Mao dan sebagai calon penggantinya pada Kongres Nasional PKC IX yang berlangsung pada bulan April 1969.

Mao dan Zhou Enlai menafsirkan semakin-meningkatnya dominasi militer dan terutama pengaruh Lin Biao itu sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka. Oleh karenanya, dalam tahun-tahun awal 1970-an dimulailah usaha-usaha untuk mendepak Lin. Untuk itu Mao sendiri melakukan lawatan ke daerah-daerah dan bertemu dengan para kepala daerah militer untuk memeriksa loyalitas mereka. Setelah terjadi usaha kudeta militer yang melibatkan anaknya, dalam bulan September 1971 Lin Biao dan isterinya berusaha lari ke luar Cina, tetapi usahanya itu gagal karena pesawat yang ditumpanginya jatuh dan menewaskan semua penumpangnya.

Meninggalnya Lin Biao itu membuka peluang bagi kelompok pembaharu untuk tampil kembali. Pada Kongres PKC X yang diselenggarakan dalam bulan Agustus 1973, Zhou Enlai berhasil merehabilitir Deng Xiaoping, meskipun mendapat tentangan dari para pendukung Mao. Dengan dukungan Deng dan kawan-kawan dalam Kongres Majelis Rakyat Nasional IV bulan Januari 1975, Zhou kembali melontarkan gagasannya tentang modernisasi.

Setelah Zhou Enlai meninggal dalam bulan Januari 1976, Deng Xiaoping menjadi orang terkuat dalam kelompok pembaharu. Oleh karena itu ia dibenci oleh orang-orang dari kelompok Mao yang pada waktu itu masih mempunyai kedudukan kuat dalam partai. Itulah sebabnya ia kembali dipecat dari kepengurusan partai, ketika ia dituduh bertanggungjawab atas pengerahan massa di Lapangan Tiananmen pada bulan April 1976 untuk menghormati meninggalnya Zhou Enlai. Kumpulan massa itu berubah menjadi demonstrasi besar-besaran dengan poster-poster berisikan kecaman terhadap mereka yang menentang Deng Xiaoping. Karena kejadian ini Deng dituduh sebagai anti-Mao dan penganut kapitalisme.

Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Setelah Mao Zedong meninggal pada tanggal 9 September 1976, kedudukan kelompok Mao di dalam partai mulai goncang, terlebih-lebih setelah "Empat Sekawan" (kelompok yang paling anti pada Deng Xiaoping) ditangkap pada pertengahan bulan Oktober 1976. Situasi sesudah Mao meninggal itu tampak berbalik. Para pendukung Deng bermunculan di banyak daerah dan mendesak agar Deng direhabilitasi. Bentrokan-bentrokan antara pendukung Deng dan Empat Sekawan terjadi di Hubei, Szechwan, Shangsi, Fukien, Hoilungqiang, Yunnan, Kweichow, Chekian dan Liaoning. Sementara itu di Beijing tanggal 7 Januari 1977 muncul poster-poster dinding yang menuntut agar Komite Sentral PKC yang dipimpin oleh Hua Guofeng merehabilitasi Deng Xiaoping.⁵

Bentrokan itu berhasil diatasi berkat penengahan tokoh militer kawakan Marsekal Ye Jiansying. Pada Konferensi Kerja Komite Sentral PKC yang

berlangsung bulan Maret 1977 diputuskan suatu resolusi yang mengizinkan Deng tampil kembali dalam kepemimpinan partai dengan satu syarat yaitu Deng harus mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya pada masa-masa yang lalu. Kemudian, karena berbagai tekanan dari kelompok-kelompok pendukung Deng, Sidang Pleno Ke-3 Kongres Komite Sentral PKC X bulan Juli 1977, akhirnya memutuskan untuk: (1) mengangkat Hua Guofeng menjadi Ketua Partai dan Ketua Komisi Militer Komite Sentral PKC. (2) mengangkat Deng Xiaoping sebagai Wakil Ketua Partai I, Wakil Ketua Komisi Militer Komite Sentral, Wakil Perdana Menteri dan Ketua Staf Jenderal-jenderal; (3) memecat Empat Sekawan dari keanggotaan PKC dan menyatakan bahwa mereka adalah musuh bersama.⁶ Di sini tampak bahwa Deng mempunyai pengaruh begitu besar tidak saja di kalangan para tokoh partai tetapi juga di kalangan tokoh-tokoh militer. Tidak mengherankan kalau sampai sekarang ia tetap duduk sebagai Ketua Komisi Militer Pusat, meskipun dia tidak lagi menjadi anggota Politbiro.

Kongres Nasional PKC XI yang berlangsung dalam bulan September 1977 atau tepatnya Sidang Ke-3 Komite Sentral Kongres PKC XI dalam bulan Desember 1978, adalah awal masa kedua kekuasaan kelompok pembaharu dan merupakan saat yang menentukan perkembangan di RRC sampai sekarang. Sejak Kongres XI itu baik kejadian sebelumnya maupun rencana strategi yang akan ditempuh dibahas secara menyeluruh. Sidang sepakat bahwa pemerintah sebelumnya telah melakukan kesalahan-kesalahan sejak Kongres PKC VIII. Kesalahan terbesar adalah kebijakan "Lompatan Besar ke Depan" dan "Revolusi Kebudayaan" yang mengakibatkan menurunnya pertumbuhan perekonomian secara drastis dan timbulnya pergolakan politik.

Kongres PKC XI itu tampak mulai didominasi oleh gagasan-gagasan Deng Xiaoping. Hal ini terungkap dengan diterimanya strategi bertahap Deng dalam usahanya mengatasi krisis-krisis yang terjadi di Cina. Strategi pertama yang ia lakukan adalah memperkuat posisinya di dalam lembaga tertinggi partai yaitu Politbiro. Dalam Sidang Pleno Ke-3 Komite Pusat PKC XI yang berlangsung tanggal 18-22 Desember 1978 Deng berhasil memasukkan empat orangnya ke dalam Politbiro yaitu: janda Zhou Enlai, Chen Yun, Deng Dingchao, Hu Yaobang dan Wang Chen. Kemudian dalam Kongres Rakyat Nasional V yang bersidang tanggal 26 Desember 1978, Deng berhasil pula menarik masuk Wang Jenchung sebagai Wakil Perdana Menteri. Wang pada tahun 1933 menjadi penasihat politik Li Xiannian dan pada waktu Revolusi Kebudayaan bersama Deng didepak keluar dan dipenjarakan.⁷ Hu Yaobang, anak didiknya, pada awal tahun 1979 berhasil menjabat Sekjen Komite Sentral PKC, suatu jabatan yang telah dihapus sejak Revolusi Kebudayaan, dan

⁶Warren Kuo, "The Political Power Structure in Mainland China," *Issues & Studies*, Vol.

sebagai Kepala Dinas Propaganda menggantikan Zhang Binghua, seorang kawan dekat Hua Guofeng.⁸

Kemudian dalam Sidang Ke-2 Kongres Rakyat Nasional V yang berakhir tanggal 1 Juli 1979, Deng berhasil meningkatkan dominasi kelompok pembaharu dengan memasukkan Bo Yibo dan Yao Yillin (keduanya adalah korban Revolusi Kebudayaan) menjadi Wakil Perdana Menteri dan empat Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional, antara lain Peng Zhen, bekas Walikota Beijing yang dipecat pada permulaan Revolusi Kebudayaan. Kongres juga memilih orang Deng, Fang Yi, sebagai Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Cina.⁹ Kelompok Pembaharu ini semakin kokoh dengan masuknya Zhao Ziyang ke dalam keanggotaan Politbiro pada Sidang Pleno Kongres PKC XI bulan September 1979, setelah pada tahun 1977 diangkat sebagai anggota alternatif. Dalam bulan September 1980 Zhao Ziyang dikokohkan menjadi Perdana Menteri, sementara itu dalam Sidang Pleno Komite Sentral PKC yang berlangsung bulan Juni 1981, Hu Yaobang dikokohkan menjadi Ketua PKC. Keduanya menggantikan kedudukan Hua Guofeng. Dengan demikian semua jabatan kunci berhasil dikuasai oleh orang-orang dari kelompok Deng.

III

Setelah berhasil mendominasi keanggotaan Politbiro dan Komite Tetap Politbiro, Deng Xiaoping dan kawan-kawan mulai menerapkan strategi tahap kedua. Deng baru berani melontarkan lagi gagasan tentang *modernisasi* yang pernah dilontarkan oleh mending Zhou Enlai, pertama pada tahun 1964 dan kedua dalam Kongres Rakyat Nasional IV bulan Januari 1975. Zhou mengatakan bahwa jika Cina ingin menjadi negara sosialis yang besar dan kuat di akhir abad ke-20, maka ia harus melaksanakan empat modernisasi yaitu: modernisasi di bidang pertanian, perindustrian, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertahanan.

Pembaharuan kehidupan di pedesaan tampaknya merupakan sasaran utama kelompok pembaharu dalam strateginya itu. Pembaharuan di sektor ini sebenarnya telah dikemukakan ketika Deng Xiaoping berpidato di depan Sidang Ke-3 Komite Sentral PKC XI bulan Desember 1978. Ia secara panjang-lebar menyampaikan suatu rencana pembaharuan di bidang pertanian. Dikatakannya bahwa prioritas utama tidak lagi di bidang industri berat, tetapi di bidang pertanian yang menyangkut kehidupan sebagian besar rakyat pedesaan. Suatu sistem baru akan diterapkan menggantikan sistem lama. Sistem baru itu adalah sistem tanggungjawab kontrak atas dasar keluarga, dengan penggajian yang sesuai dengan kemampuan. Dengan sistem pertanggung-

jawaban ini keluarga-keluarga petani tidak lagi bekerja bersama-sama dalam komune-komune, melainkan menyewa tanah dari pemerintah untuk mengusahakan pertaniannya sendiri dan langsung mendapatkan keuntungan. Cara kuota akan diterapkan. Para petani diwajibkan memenuhi jatah produksi yang akan dibeli oleh pemerintah dan sisanya boleh dijual di pasar. Untuk mendukung sistem pemerintah mengizinkan usaha swasta dibuka kembali.

Sistem baru yang dilontarkan oleh Deng itu sangat bertentangan dengan sistem lama yang pada dasarnya menganut tiga prinsip yaitu: (1) pemilikan negara atas alat-alat produksi; (2) pengambilan keputusan ekonomi yang sangat tersentralisir; (3) sistem insentif yang didasarkan terutama pada pertimbangan ideologis. Berdasarkan prinsip ini Pemerintah Cina pada Pelita I (1953-1957) menutup semua usaha swasta dan menasionalisasi sekitar 9 juta perusahaan swasta. Dengan diterapkannya sistem ini ternyata pemerintah gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kegagalan itu semakin lengkap dengan dilontarkannya kebijakan "Lompatan Besar ke Depan" seperti yang telah diutarakan sebelumnya. Kegagalan sistem lama ini terutama disebabkan oleh pengawasan yang sangat ketat oleh negara, kurang tersedianya ahli-ahli ekonomi pembangunan dan pergolakan politik yang terus-menerus. Di samping itu semua pegawai dan pejabat bekerja lebih didasari oleh ketaatan ideologis daripada ketrampilan atau insentif materil. Hal ini mengakibatkan stagnasi pertumbuhan produksi. Perusahaan tidak dirangsang untuk meningkatkan efisiensi dan pekerja menjadi malas karena rajin pun (pendapatan) yang diperolehnya sama saja.

Strategi pembangunan Deng ini baru diterapkan sepenuhnya pada tahun 1979, setelah ia berhasil memantapkan posisi kelompoknya baik di dalam partai maupun di dalam pemerintahan. Uji coba selama empat tahun (1979-1982) menunjukkan hasil yang positif. Tampak pendapatan penduduk di pedesaan meningkat tajam. Hasil pertanian rata-rata naik 6,5% per tahun (berdasarkan harga konstan tahun 1980).¹⁰ Sementara itu jumlah usaha swasta yang pada tahun 1978 tinggal sekitar 150.000, pada tahun 1982 meningkat kembali menjadi 1.470.000 buah.¹¹ Di samping itu perekonomian pedesaan bergerak menuju spesialisasi dan dengan sistem insentif itu para petani berlomba meningkatkan produksi mereka dengan harapan agar sisa hasil yang dijual kepada pemerintah meningkat. Dengan demikian mereka dapat menjual lebih banyak hasil di pasar bebas.

Hasil-hasil yang diperoleh itu mempertebal keyakinan kelompok pembaharu untuk meningkatkan usaha modernisasi. Dalam laporannya pada Kongres PKC XII bulan September 1982, Hu Yaobang menyatakan antara

lain bahwa: (1) pemerintah akan melipatgandakan hasil pertanian dan industri tahunannya dari 710 milyar Yuan (sekitar US\$364,1 milyar) menjadi 2,8 trilyun Yuan (atau US\$1,4 trilyun) pada akhir abad ke-20; (2) politik ekonomi pintu terbuka dan kebijakan mengimpor teknologi asing adalah suatu perkembangan yang rasional dan bukan tindakan tanpa dasar; (3) kekuatan pasar sangat esensial, meskipun hal itu merupakan nomor dua dalam ekonomi sosialis; (4) ekonomi individual dan kolektif masih tetap penting untuk beberapa tahun sebagai pelengkap sektor negara. Sistem pertanggungjawaban harus dilanjutkan, sebab hal itu merupakan pencerminan kehendak rakyat. Sistem ini memberikan tambahan penghasilan kepada petani dan meningkatkan semangat kerja mereka, memenuhi kuota produksi dan memberi kesempatan kepada mereka untuk menjual sendiri kelebihan produk yang dihasilkan.

Keberhasilan di sektor ekonomi pedesaan itu bisa tercapai karena kebijakan lain yang mendukung, seperti desentralisasi pengambilan keputusan untuk memberi kesempatan kepada para manajer untuk meningkatkan produktivitas, tanggungjawab dan efisiensi kerja. Peraturan baru memungkinkan para manajer menentukan rencana produksi dan pemasaran, mempekerjakan dan memecat pegawai, menentukan besarnya bonus dan pada tingkat tertentu menentukan harga sendiri. Negara juga mengizinkan perusahaan menyimpan sisa keuntungan setelah sebagian disetorkan sebagai pajak.

Kebijakan desentralisasi ini hanya bisa berhasil karena diperbaikinya sistem pasar dan harga. Sebelumnya harga produk dianggap tidak realistis karena ditentukan oleh pemerintah dan bukan ditentukan oleh pasar. Dengan sistem baru, pemerintah mendorong mekanisme pasar yang didasari oleh permintaan dan penawaran. Dengan demikian harga memang mencerminkan biaya produksi yang lebih riil. Sistem baru ini tampaknya berusaha mengembangkan sistem ekonomi campuran yang bercirikan suatu sistem pemilikan oleh negara pada sektor pelayanan masyarakat, desentralisasi pengambilan keputusan di bidang ekonomi, pengawasan tidak langsung atas kegiatan makro-ekonomi oleh penguasa pusat, dan mekanisme pasar.

Sejak awal pelaksanaannya, banyak hambatan sudah dihadapi oleh sistem baru itu. Hambatan-hambatan itu tidak saja karena pada awalnya program yang dicanangkan terlalu ambisius, tetapi juga karena sistem tersebut belum sepenuhnya diterima oleh semua pihak. Untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, Deng dan kawan-kawan tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Mao Zedong. Tampaknya ia sangat memperhatikan kerukunan nasional dan berusaha merangkul lawan-lawannya, misalnya dengan memberikan pembenaran-pembenaran bagi kebijakan yang sedang ditempuh. Di samping itu pemerintah baru Cina juga terbuka

Koreksi penting yang dilakukan misalnya adalah penundaan pembangunan di beberapa sektor industri berat dan meningkatkan pembangunan industri ringan yang lebih bermanfaat bagi kehidupan pertanian.

Dalam memelihara kestabilan nasional itu, Deng bahkan berani mengorbankan Hu Yaobang turun dari jabatan pemimpin tertinggi PKC, ketika terjadi demonstrasi mahasiswa pada akhir tahun 1986 dan awal tahun 1987. Hu dituduh bertanggungjawab dan menyimpang dari empat prinsip partai yaitu: diktator proletariat, jalan sosialisme, kepemimpinan PKC dan ideologi Marxis-Leninis. Pertimbangan kerukunan nasional dan stabilitas nasional itu pulalah yang mendasari keputusan-keputusan yang dibuat dalam Kongres PKC XIII yang berlangsung tanggal 25 Oktober-1 November 1987. Deng dan kawan-kawan tidak ingin lagi menggunakan apa yang disebut pembersihan. Hu Yaobang, meskipun pernah salah, tetap diangkat menjadi anggota Politbiro dan Hua Guofeng yang dianggap tokoh Maois yang radikal tetap menjadi anggota Komite Sentral.

Cara Deng menggeser tokoh-tokoh tua juga cukup terpuji. Mereka tidak langsung dipensiun, tetapi digeser secara bertahap dengan dibentuknya Komisi Penasihat Pusat yang anggotanya adalah tokoh-tokoh revolusi dan teman-teman dekat Deng. Bahkan Deng sendiri rela mundur dari keanggotaan Politbiro guna menarik keluar tokoh-tokoh tua seangkatannya yang selama ini dianggap sebagai penghalang pembaharuan seperti Chen Yun, Li Xiannian, Peng Zhen, Deng Liqun, Yang Deshi dan Yu Quili.

Kebijakan yang sangat moderat ini tampaknya meningkatkan popularitas Deng dan kawan-kawan tidak saja di kalangan rakyat, tetapi juga di kalangan tokoh partai. Hal ini terbukti dari hasil-hasil Kongres PKC XIII, yang jelas sangat mendukung kebijakan kelompok pembaharu. Kalau pada Kongres PKC XII kritik-kritik terhadap kebijakan yang dilontarkan oleh kelompok Deng masih terdengar, maka pada Kongres yang terakhir ini kritik-kritik seperti itu tidak terdengar lagi. Kebijakan modernisasi yang telah berlangsung sejak tahun 1979 kiranya sudah dapat diterima dan dirasakan hasilnya. Hasil pengamatan *Beijing Review* yang dimuat dalam penerbitannya nomor 7, tanggal 16 Februari 1987, secara jelas melaporkan kemajuan kehidupan di RRC. Penelitian yang dilakukan terhadap 17.000 keluarga di 106 kota besar di RRC itu mengungkapkan bahwa pada tahun 1986 kesejahteraan di kota-kota tersebut meningkat. Pendapatan per kapita naik 18% dari tahun 1985 dan mencapai 890 Yuan (US\$1 = 2,878 Yuan). Sementara itu *Beijing Review* nomor 11, tanggal 16 Maret 1987 melaporkan bahwa pendapatan per kapita petani meningkat terus dari 191,32 Yuan pada tahun 1980 menjadi 424,00 Yuan pada tahun 1986. Tampaknya itulah sebabnya mengapa Zhao Ziyang diberi kepercayaan untuk melanjutkan kenemimpinan tertinggi PKC. Mereka

IV

Semakin kokohnya posisi kelompok pembaharu setelah Kongres PKC XIII berakhir akan memperlancar pelaksanaan rencana yang telah dicanangkan sejak kelompok pembaharu itu berkuasa dalam kebijakan pertahanan. Sebagian dari rencana itu telah dilaksanakan seperti misalnya pengurangan anggaran belanja pertahanan dan reorganisasi Tentara Pembebasan Rakyat dalam usaha meningkatkan efisiensi. Sejak tahun 1980 Pemerintah Cina telah menurunkan anggaran belanja pertahanannya lebih dari 6% (dari GNP) menjadi kurang 3%.¹² Sementara itu dalam kerangka kebijakan reorganisasi, pemerintah telah meniadakan beberapa bidang tugas seperti pasukan artileri medan, pasukan khusus kereta api (*railroad troops*), dan beberapa bidang tugas yang pengelolaannya diserahkan kepada golongan sipil seperti Korps Zeni Konstruksi Ibukota, dan cabang-cabang komunikasi. Dalam bulan Juni 1985 daerah komando militer dicitutkan dari 11 menjadi tujuh daerah saja. Hingga bulan Desember 1986 pemerintah telah mendemobilisasikan 410.000 personil. Penciutan jumlah personil ini dianggap masih jauh dari target yang direncanakan yaitu penciutan dari 4,2 juta menjadi 1 juta. Reorganisasi TPR itu hanya bisa berhasil karena Deng Xiaoping sendiri yang menangani langsung sejak ia diangkat menjadi Ketua Komisi Militer Pusat pada Sidang Pleno Komite Sentral Ke-6 Kongres PKC XI akhir Juni 1981.

Beberapa alasan sering dinyatakan baik oleh Deng, Hu Yaobang, Zhao Ziyang, maupun para pemimpin TPR seperti Yang Shangkun (Wakil Ketua Permanen Komisi Militer Pusat) untuk memberikan pembenaran kebijakan pertahanan yang dewasa ini dilakukan pemerintah. Alasan pertama adalah menurunnya ancaman konflik militer di perbatasan antara RRC dan Uni Soviet. Memang sejak kelompok pembaharu berkuasa, konflik perbatasan antara kedua negara boleh dikatakan tidak terjadi lagi. Bahkan hubungan dagang di perbatasan kedua negara makin meningkat. Berkurangnya ketegangan di daerah perbatasan ini dan terus membaiknya hubungan kedua negara memungkinkan Pemerintah Beijing untuk mengurangi kesiagaan tempur di kawasan perbatasan yang sebelumnya menjadi pusat perhatian TPR. Dengan demikian anggaran pertahanan yang dimaksudkan untuk keperluan itu bisa dialihkan untuk keperluan lain yang lebih mendesak seperti modernisasi persenjataan.

Modernisasi persenjataan ini oleh Pemerintah RRC dianggap tidak saja penting untuk meningkatkan kualitas TPR dalam menghadapi kemungkinan perang modern, tetapi juga penting untuk pembangunan nasional itu sendiri. Selama ini RRC dikenal sebagai pengeksport senjata yang cukup besar di samping Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Perancis, dan lain-lain. Kedudukan RRC sebagai salah satu negara pemasok senjata ini telah memberikan

Banyak negara mulai tertarik untuk membeli senjata dari negeri itu. Muangthai, misalnya, yang secara tradisional merupakan pembeli senjata Amerika Serikat, telah mulai membeli persenjataan dari RRC. Pada pertengahan bulan Mei 1987, KASAD Muangthai, Chaowalit Yongchayut, berkunjung ke Beijing dan menandatangani suatu perjanjian pembelian persenjataan dengan Pemerintah Cina. Pembelian persenjataan itu meliputi 30 buah tank T-69, sejumlah meriam artileri 130 mm, meriam penangkis serangan udara kaliber 37 mm dan beberapa kendaraan lapis baja pengangkut personil (APC). Semuanya bernilai US\$10 juta.¹³ Negara lain yang meningkatkan pembeliannya adalah Iran. Berdasarkan program penjualan senjata ke Iran, RRC telah menjual 96 rudal Silkworm senilai US\$1 milyar.¹⁴

Semakin banyaknya negara yang tertarik pada persenjataan itu, mendorong Cina untuk meningkatkan usaha perluasan industri persenjataan dan transfer teknologi persenjataan dari negara-negara lain. Usaha ini telah dicanangkan dalam Repelita VII (1986-1990) dan hasilnya sudah pula terungkap, misalnya, dengan munculnya pembom B 6D buatan RRC pada pertengahan bulan Januari 1987. Pesawat itu berkecepatan supersonik dan mampu meluncurkan rudal, serta mempunyai peralatan navigasi elektronik mutakhir.¹⁵ Akhir bulan November ini untuk pertama kalinya RRC juga mengadakan pameran persenjataan hasil produksinya dan mengundang beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Jerman Barat, Inggris, dan Perancis untuk ikut serta.

Industri persenjataan ini mempunyai andil besar dalam perindustrian RRC. Di samping menyerap tenaga kerja ia juga mempunyai andil sekitar 25% dari keseluruhan kapasitas produksi, dan menghasilkan sekitar 10% dari GNP.¹⁶ Pada tahun 1984 saja RRC telah berhasil mengekspor persenjataan senilai US\$1,6 milyar.¹⁷ Keberhasilan ini disebabkan oleh rendahnya biaya produksi dan kemampuannya menyerap teknologi modern, sehingga RRC mampu bersaing dalam harga dan kualitas.

Andil industri persenjataan dalam meningkatkan dana pembangunan ini merupakan alasan pembenaran kedua bagi kebijakan pertahanan baru. Alasan yang diberikan oleh para tokoh pembaharu itu untuk memodernisir persenjataan semakin diterima oleh tokoh-tokoh TPR setelah mereka melihat sendiri kenyataan bahwa kualitas persenjataan yang digunakan oleh TPR dalam Perang Cina-Vietnam awal tahun 1979 sangat tertinggal. Dalam perang

¹³*Prioritas*, 19 Mei 1987.

¹⁴*Suara Pembaruan*, 27 Oktober 1987.

¹⁵*Kompas*, 16 Januari 1987.

¹⁶Jack W. Lynch, "The Chinese Military Industrial Complex and Defense Modernization"

itu terbukti bahwa dalam perang modern jumlah tentara yang besar tidak lagi menentukan kemenangan, dan RRC menderita korban yang besar. Perang menghadapi pasukan Vietnam itu tampaknya menjadi pelajaran berharga dan sekaligus pil pahit bagi RRC untuk kemudian meningkatkan kemampuan dan teknologi militer yang lebih canggih.

Pada pidato pembukaan Kongres PKC XIII Zhao Ziyang menyatakan bahwa RRC akan mempertahankan suatu kebijakan yang independen dan mengembangkan hubungan persahabatan dengan semua negara. Untuk kepentingan pembangunan nasionalnya RRC juga ingin mengembangkan hubungan persahabatannya dengan semua negara yang bisa diartikan sebagai kelanjutan kebijakan luar negeri kelompok pembaharu sejak mereka berkuasa pada tahun 1978.

Pernyataan Zhao Ziyang itu juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Cina sekarang ini tidak lagi memberi penekanan pada hubungan yang bersifat ideologis seperti pada pemerintahan sebelumnya. Untuk membuat Cina menjadi negara yang kuat dan modern di awal abad ke-21, Pemerintah Beijing berusaha mengembangkan hubungan luar negerinya yang pragmatis. Untuk kebutuhan dana dan transfer teknologi, misalnya, RRC melontarkan kebijakan *pintu terbuka*. Dengan kebijakan ini sejak tahun 1978 banyak pemimpin dan ahli Cina berkunjung ke negara-negara industri maju, terutama Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Barat lainnya. Demikian pula banyak mahasiswa Cina dikirim ke negara-negara tersebut untuk mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan modernisasi.

Dalam usaha menggalakkan investasi, Pemerintah Cina juga memutuskan kebijakan "satu negara dua sistem" yaitu di bawah kedaulatan sistem sosialis, sistem kapitalis diijinkan untuk hidup. Deng Xiaoping dan Zhao Ziyang sering mengatakan bahwa sistem ini diterapkan untuk tujuan penyatuan Hongkong, Macao dan Taiwan. Tetapi dengan diputuskannya 14 kota yang terletak di sepanjang pantai timur sebagai daerah-daerah administrasi khusus yang boleh menentukan peraturan-peraturan yang berbeda guna merangsang modal asing, maka sasaran dari kebijakan satu negara dua sistem itu jelas bukan melulu untuk penyatuan kembali ketiga wilayah itu, melainkan juga untuk menarik sebanyak mungkin modal dan dana dari negara-negara lain yang sangat penting bagi kelancaran pembaharuan.

Meskipun telah dan sedang menghadapi banyak hambatan, Pemerintah Beijing tampaknya akan tetap meneruskan kebijakan-kebijakan tersebut. Hal

... menutup sebuah negara terhadap dunia luar hanya akan meningkatkan keterbelakangan. Kita tidak akan pernah kembali lagi kepada masyarakat tertutup di masa lampau, ketika rakyat dilarang berhubungan dengan pemikiran-pemikiran lain. ...¹⁸

Pernyataan itu jelas merupakan penegasan kebijakan pintu terbuka. Hambatan-hambatan seperti masih banyaknya investor asing yang enggan menanamkan modal mereka di Cina karena peraturan-peraturan yang berbelit-belit, sulitnya memperoleh bahan baku dan lain-lain, kelihatannya akan lebih mendapat perhatian. Tampaknya Pemerintah Cina sadar akan pentingnya investasi asing dalam pembangunan nasional. Meskipun kontrak investasi dengan pihak asing, yang pada pertengahan tahun 1986 telah mencapai sebesar US\$18,1 milyar, baru terwujud sebesar US\$5 milyar, Pemerintah Beijing tidak putus asa dan berusaha terus memperbaiki kondisi yang lebih menarik bagi penanaman modal asing, misalnya dengan mengadakan deregulasi. Dalam bulan Oktober 1986 Pemerintah Cina mengeluarkan 22 peraturan baru yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi penanaman modal asing. Peraturan-peraturan itu menawarkan suatu perlakuan istimewa bagi calon penanam modal.¹⁹

Penegasan Zhao Ziyang itu tampaknya untuk meyakinkan para investor Barat yang sebelumnya merasa khawatir akan situasi anti-Barat di Cina terutama setelah terjadi demonstrasi mahasiswa yang akhirnya mengakibatkan jatuhnya Hu Yaobang. Tetapi yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana sikap Perdana Menteri yang baru, Li Peng. Meskipun dia merupakan anak didik Zhou Enlai dan pendukung kelompok pembaharu, dikabarkan dia lebih bersikap hati-hati terhadap penanaman modal dari Barat. Pada bulan Februari 1987, ia pernah memperingatkan para penanam modal Barat agar bersiap-siap secara psikologis karena pemerintah segera akan meninjau kembali kontrak mereka.²⁰ Memang ucapan itu dinyatakan ketika Pemerintah Cina sedang berusaha mengatasi gejolak politik yang disebabkan oleh demonstrasi mahasiswa. Dengan anggapan bahwa perusahaan-perusahaan Barat ikut bertanggungjawab dengan cara mempengaruhi masyarakat Cina lewat pemikiran-pemikiran Barat mereka, peringatan Li Peng itu muncul. Apakah penegasan Zhao Ziyang itu merupakan jaminan yang bisa meyakinkan para investor Barat, sampai saat ini belum bisa diketahui karena secara teoretis pemerintahan sehari-hari akan dipimpin oleh Li Peng.

Hubungan RRC dengan Uni Soviet tampaknya juga akan mengalami perubahan-perubahan lebih lanjut. Hal itu mulai tampak sekurang-kurangnya sejak RRC menerima tawaran Soviet untuk merundingkan normalisasi hubungan kedua negara yang dilontarkan oleh Brezhnev di Tashkent bulan Maret 1982. Sejak pertengahan tahun 1950-an hubungan antara RRC dan Uni Soviet terus memburuk terutama karena adanya perbedaan

¹⁸Kompas, 26 Oktober 1987.

dasar pandangan ideologi dan kepemimpinan dalam dunia komunis. RRC menuduh Uni Soviet sedang melaksanakan revisi terhadap ideologi Marxis-Leninis, dan kemudian konfliknya memuncak menjadi perang perbatasan pada tahun 1969, Cina pada dasawarsa 1970-an menganggap Uni Soviet sebagai musuh nomor satu, dan menuduhnya sebagai negara yang mempunyai ambisi hegemoni yang paling besar di dunia. Hubungan Cina-Soviet juga memburuk setelah pasukan Vietnam melakukan invasi ke Kampuchea akhir tahun 1978 dan pasukan Soviet masuk ke Afghanistan tahun 1979.

Sikap baru Cina itu membuahkan babak baru hubungan Cina-Soviet yang tampaknya semakin akrab. Sampai bulan November 1987 RRC dan Uni Soviet sudah menyelesaikan perundingan babak ke-12. Hubungan dagang pun meningkat pesat. Kalau pada tahun 1979 ekspor ke Uni Soviet hanya bernilai US\$242 juta dan impornya bernilai US\$250 juta, maka pada tahun 1985 eksportnya meningkat menjadi bernilai US\$1.037 juta dan impornya bernilai US\$1.017 juta.²¹ Sebab utama peningkatan itu adalah dibukanya kembali hubungan dagang tradisional di wilayah perbatasan.

Dalam suasana baru itu Pemerintah Beijing rupanya berharap agar Uni Soviet mau membantu menghidupkan kembali proyek-proyek bersama yang menggunakan teknologi Soviet. Hal ini oleh Beijing dianggap lebih murah daripada harus membangun proyek baru dengan teknologi Barat. Suasana yang semakin amari di wilayah perbatasan dan hubungan dagang yang terus meningkat antara kedua negara itu jelas akan tetap dipelihara oleh Pemerintah Beijing karena hal itu sangat mendukung pelaksanaan modernisasi yang sekarang ini sedang digalakkan.

Meskipun demikian tampaknya Beijing tetap ingin menjaga jarak dengan tidak terlalu tergesa-gesa meningkatkan hubungan politiknya dengan Moskow. Hal ini tampaknya berkaitan dengan usaha Beijing mempertahankan hubungan baiknya dengan Barat, terutama Amerika Serikat, dan Jepang demi lancarnya transfer teknologi dan bantuan ekonomi lainnya.

Dengan demikian jelas bahwa pernyataan Zhao Ziyang pada pembukaan Kongres PKC XIII itu lebih ditujukan untuk kepentingan pembaharuan di dalam negeri daripada kepentingan politik atau strateginya. Peningkatan hubungan dengan semua negara diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan nasionalnya dan dapat pula mengurangi anggaran belanja pertahanan sehingga dapat dialihkan ke sektor-sektor lain. Di samping itu hubungan yang baik dengan semua negara itu juga bisa melunakkan sikap keras dari sekelompok pemimpin Cina yang selama ini menghendaki diperbaikinya hubungan dengan Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya. Usaha Zhao itu akhirnya membawa hasil. Dia bisa mempersatukan para pemimpin PKC dan bahkan kemudian dipilih menjadi pemimpin tertinggi